

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan LKjIP, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong BLH Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Jawa Tengah.
2. Menjadikan pelaksanaan kegiatan BLH Provinsi Jawa Tengah akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan *Stakeholders* di Jawa Tengah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap BLH Provinsi Jawa Tengah.
5. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik.

### B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 adalah:

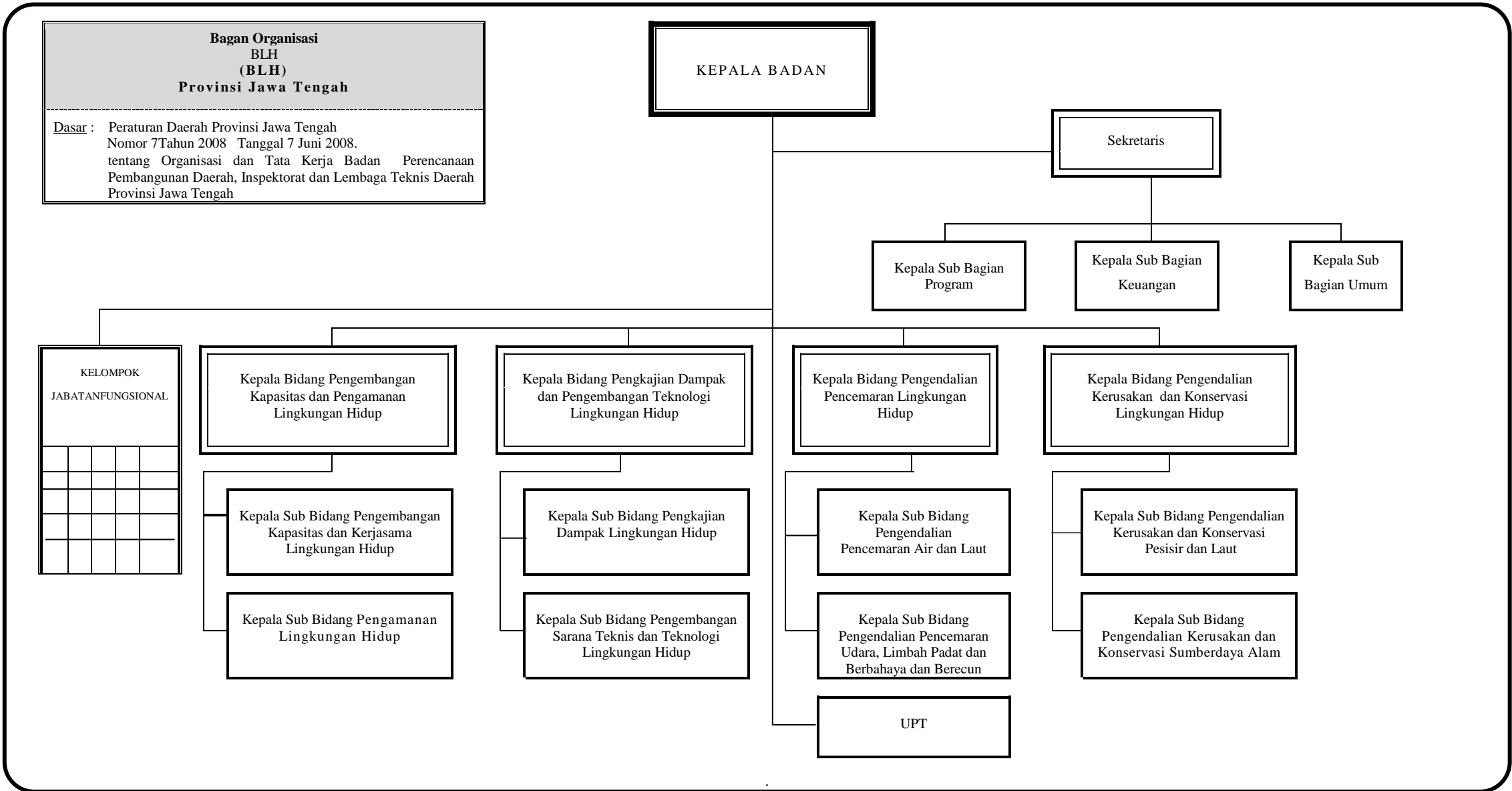
1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil evaluasi kegiatan;
3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
4. Terwujudnya tertib administrasi kegiatan;
5. Sebagai alat bukti pelaporan pelaksanaan program dan hasil kegiatan kepada Publik.

## D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### D.1. Struktur Organisasi

Menindaklanjuti PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sejak tanggal 7 Juni 2008 nomenklatur dan struktur organisasi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedal) Provinsi Jawa Tengah berubah, yakni menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Struktur Organisasi BLH Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008, sebagai berikut :

- a. Susunan Organisasi BLH terdiri dari :
  - 1) Kepala Badan :
  - 2) Sekretariat, membawahkan :
    - (a) Sub Bagian Program
    - (b) Sub Bagian Keuangan
    - (c) Sub Bagian Umum
  - 3) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengamanan Lingkungan Hidup, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama dan Lingkungan Hidup
    - b) Sub Bidang Pengamanan Lingkungan
  - 4) Bidang Pengkajian Dampak dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
    - b) Sub Bidang Pengembangan Sarana Teknis dan Teknologi Lingkungan Hidup
  - 5) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Laut
    - b) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun
  - 6) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumberdaya Alam.
    - b) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Pesisir dan Laut.
  - 7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yakni Balai Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha.
    - b) Seksi Pengujian dan Analisa Air.
    - c) Seksi Pengujian dan Analisa Udara, Biologi dan Tanah.
  - 8) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Reorganisasi Tata Kerja Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup Sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Struktur Organisasi BLH Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :



## **D.2. Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka kedudukan BLH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

## **D.3. Tugas Pokok**

BLH mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

## **D.4. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas BLH menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas dan pengamanan lingkungan hidup, pengkajian dampak dan pengembangan teknologi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, kerusakan dan konservasi lingkungan hidup Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- 5) Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS**

### **1 Susunan Kepegawaian**

Jumlah pegawai Badan Lingkungan Hidup sebanyak 95 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

#### **a). Berdasarkan jenjang pendidikan**

Berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, susunan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi :

- Pendidikan Sekolah Dasar (SD) : 1 Orang
- Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : 4 Orang
- Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : 16 Orang
- Pendidikan Diploma 3 (D3) : 17 Orang
- Pendidikan Sarjana (S1) : 36 Orang
- Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 20 Orang
- Pendidikan Pasca Sarjana (S3) : 1 Orang

#### **b) Berdasarkan kepangkatan**

Berdasarkan kepangkatan/Golongan, susunan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi :

- Golongan I : 3 Orang;
- Golongan II : 18 Orang;
- Golongan III : 59 Orang;
- Golongan IV : 15 Orang.

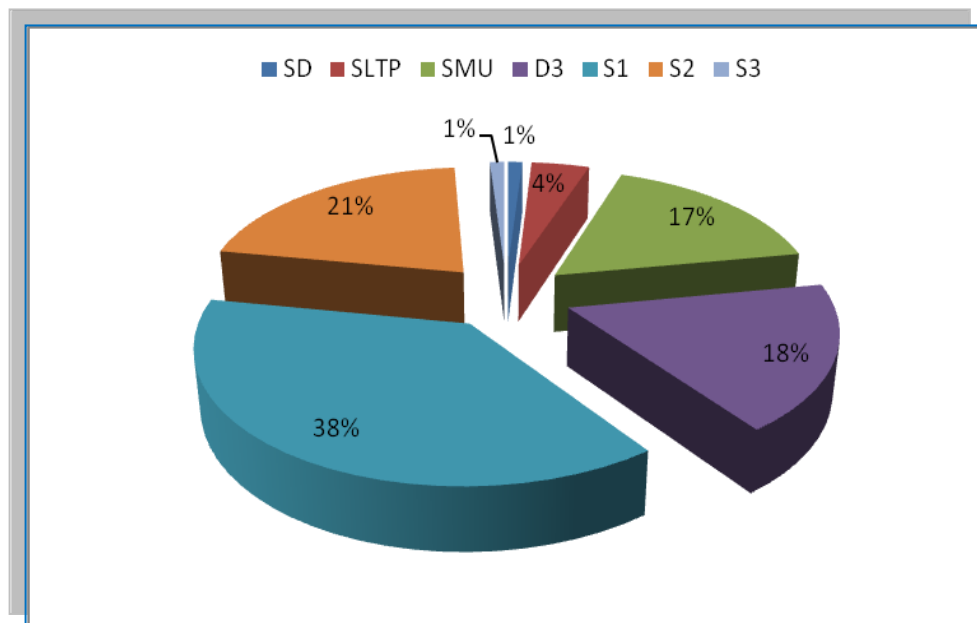
- c) Berdasarkan Jenis Kelamin  
 Berdasarkan Jenis kelamin, susunan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi:
- Pria : 59 Orang;
  - Wanita : 36 Orang.

## 2 Sarpras

Perlengkapan sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

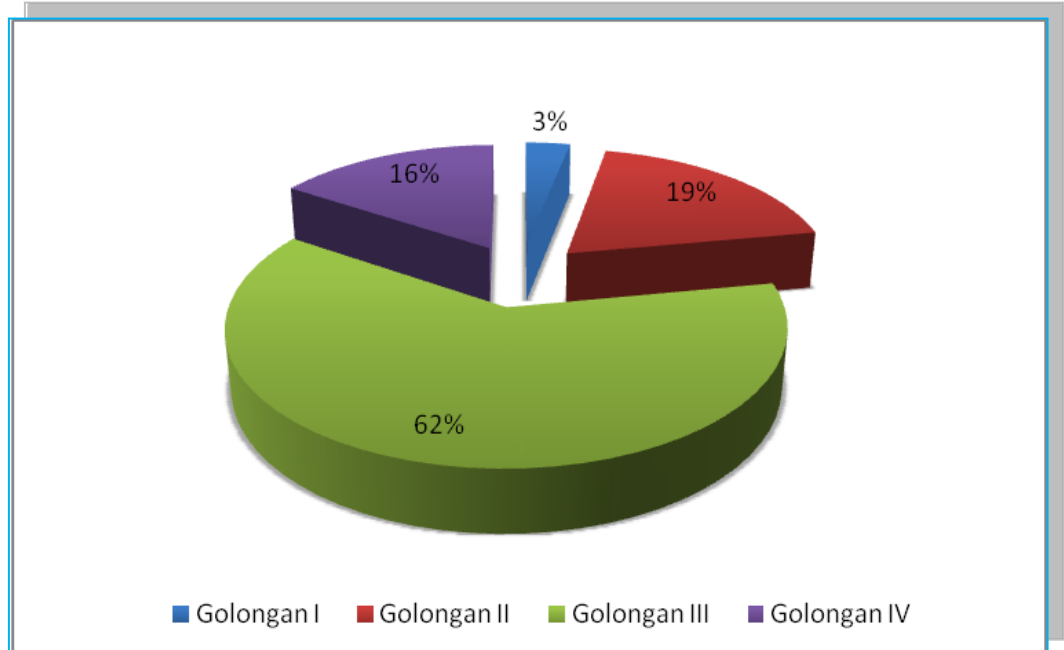
NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Alat-alat besar	8
2	Alat-alat angkutan	17
3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	68
4	Alat-alat kantor dan Rumah tangga	2.137
5	Alat-alat Studio dan Komunikasi	39
6	Alat-alat Laboratorium	946
7	Gedung dan Bangunan/ Bangunan Air kotor / IPAL	6
8	Buku dan Perpustakaan	859

**Grafik 1.1**  
**Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015**



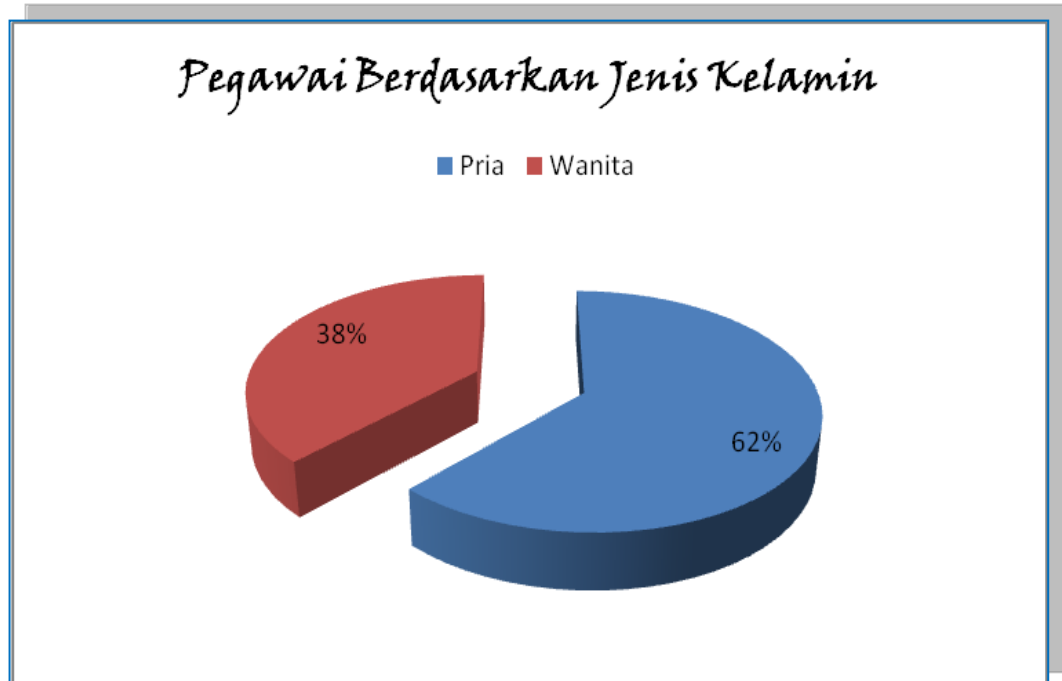
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2015

**Grafik 1.2**  
**Proporsi Pegawai Berdasarkan Golongan 2015**



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2015

**Grafik 1.3**  
**Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 2015**



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2015

## BAB II

### RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Tahun 2015 sesuai RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah UMKM, industri menengah besar, ADIPURA, Penanganan Kasus Lingkungan, Kualitas Dokumen AMDAL dan Kualitas Laboratorium Lingkungan.
2. Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah pesisir, Informasi Status Mutu Udara Ambien dan Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau/ RTH Perkotaan
4. Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar kawasan hutan
5. Meningkatnya kesadaran dan penataan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
6. Meningkatnya kualitas informasi lingkungan
7. Meningkatnya kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup
8. Meningkatnya Pengetahuan, Kemampuan dan Ketrampilan dalam PLH.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya Visi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yaitu Menjadi Lembaga yang Tanggap dan Mampu Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Lestari Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2015 telah ditetapkan 12 program 49 kegiatan untuk dilaksanakan melalui pembiayaan APBD.

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2013- 2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta merupakan landasan maupun pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai Tahun 2013 s/d 2018.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Visi dan Misi Badan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, yakni :

**a. Visi**

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni :

**“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI. MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI”**

Dengan mengacu pada Visi Provinsi Jawa Tengah, maka BLH Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi :

**“MENJADI LEMBAGA YANG TANGGAP DAN MAMPU MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

Maksud dari Visi tersebut adalah menjadi pencetus ide, pemrakarsa, menggerakkan, mengkoordinir, memfasilitasi, memotivasi dan sebagai mediator dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

**b. Misi**

Guna mewujudkan Visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
- b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”
- d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
- e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
- f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
- g. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Sedangkan Misi SKPD adalah, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mitigasi dan adaptasi bencana, kelestarian ekosistem serta pengawasan dan penataan hukum bidang lingkungan;
- b. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan, aparatur yang profesional, peraturan perundangan, sistem informasi dan pelayanan di bidang lingkungan hidup
- c. Meningkatkan kemitraan bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, ketrampilan dan kemandirian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal

### **c. Tujuan**

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, yakni :

1. Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
2. Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Bencana, Kelestarian Ekosistem serta Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng
3. Meningkatkan upaya pengendalian kerusakan lingkungan dan pelestarian ekosistem melalui konservasi.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup dan profesionalisme aparatur
5. Meningkatkan penyediaan dan penyebarluaskan informasi lingkungan bagi masyarakat
6. Meningkatkan Kemitraan Bersama Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya, Ketrampilan dan Kemandirian

### **d. Strategi**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Lingkungan Hidup, maka disusun strategi yang meliputi :

- a. Pelaksanaan PROPER, ADIPURA, Pengelolaan limbah B3, Fasilitasi bangunan biodigester, Pengitungan daya dukung dan daya tampung, Penanganan kasus lingkungan hidup serta Penilaian dokumen AMDAL yang dinilai oleh Tim Komisi AMDAL dan Peningkatan Kualitas Laboratorium Lingkungan.
- b. Pengkayaan tanaman penghijauan pantai; Pemantauan kualitas udara ambien dan Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng
- c. Pengkayaan tanaman pada Ruang Terbuka Hijau perkotaan
- d. Peningkatan jumlah bibit tanaman konservasi di kawasan kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan; Pengkayaan tanaman langka/ lokal; Pembangunan bangunan konservasi sipil teknis.
- e. Penyusunan/revisi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang LH
- f. Penyusunan SLHD dan Buletin Warta Lingkungan
- g. Pembinaan sekolah peserta adiwiyata; Pelatihan/pembelajaran kader lingkungan; Perencanaan dan Monev PLH; Peringatan Hari Lingkungan Hidup, Agro Expo dan Gelar Teknologi Lingkungan
- h. Pelatihan/pembelajaran terhadap anggota kelompok masyarakat/kader lingkungan dan Operator IPAL.

#### e. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sesuai RENSTRA Tahun 2013 – 2018, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah UMKM, industri menengah besar, ADIPURA, Penanganan Kasus Lingkungan, Kualitas Dokumen AMDAL dan Kualitas Laboratorium Lingkungan;
2. Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah pesisir, Informasi Status Mutu Udara Ambien dan Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau/RTH Perkotaan;
4. Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar kawasan hutan;
5. Meningkatnya kesadaran dan penataan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
6. Meningkatnya kualitas informasi lingkungan;
7. Meningkatnya kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup;
8. Meningkatnya Pengetahuan, Kemampuan dan Ketrampilan dalam PLH;

Indikator Kinerja dari sasaran tersebut di atas, yakni :

- a. Jumlah usaha/kegiatan; Jumlah Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL); Jumlah biodigester; Hasil Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung; Informasi status mutu air, Kab/Kota peraih ADIPURA, Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti serta Jumlah AMDAL yang disahkan dan Kualitas Laboratorium Lingkungan;
- b. Jumlah Tanaman penghijauan pantai; Informasi status mutu udara ambien dan Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
- c. Pengkayaan tanaman pada Ruang Terbuka Hijau (RTH); Pengurangan tingkat kerusakan lingkungan hutan dan lahan;
- d. Jumlah tanaman tutupan lahan di kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan; jumlah tanaman langka/lokal; Bangunan konservasi sipil teknis;
- e. Penyusunan PERDES Pelestarian PLH; Penyusunan/revisi serta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang LH;
- f. Dokumen SLHD dan Buletin Warta Lingkungan ;
- g. Jumlah sekolah yang mengikuti program ADIWIYATA; Jumlah kader lingkungan yang dilatih;
- h. Jumlah kader lingkungan; Jumlah peserta dalam pelatihan pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk/biogas; Jumlah peserta pelatihan operator IPAL;

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang disepakati antara kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dengan kepala daerah Tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terinformasinya status mutu air sungai yang menjadi sungai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase status mutu air yang diinformasikan	100 % (8 sungai)
2	Tertanganinya kasus lingkungan akibat dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup	Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran / perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Menengah Besar	Jumlah UMKM dan/ atau obyek domestik dan usaha/ atau kegiatan menengah/ besar yang diawasi dan ditangani pengelolaan limbahnya	15 UMKM, 170 usaha dan/ atau kegiatan
4	Meningkatnya kebersihan dan keteduhan di daerah perkotaan di Jawa Tengah	Jumlah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang memperoleh ADIPURA	14 Kabupaten/ Kota
5	Meningkatnya kualitas dokumen AMDAL/ UKL-UPL	Jumlah rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL)- Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah dilaksanakan	10 usaha/ kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada pelaku usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	75 pelaku usaha/ kegiatan
7	Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar kawasan hutan	Lahan kritis di luar kawasan hutan yang ditangani: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tanaman konservasi</li> <li>- Jenis tanaman lokal unggulan/ langka</li> <li>- Jumlah bangunan sipil teknis</li> </ul>	1) 113.000 batang 2) 40 jenis tanaman langka 3) 40 bangunan sipil teknis
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan	40 Ha
9	Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah pesisir	1) Jumlah tanaman/ luasan penghijauan pantai 2) Bangunan pencegah abrasi/erosi/sabuk pantai	1) 510.000 batang 2) 535 meter
10	Terinformasinya status mutu udara ambient 35 Kab/ Kota di Jawa Tengah	Persentase status mutu udara ambient Kabupaten/ Kota yang diinformasikan	100 % (35 Kabupaten/ Kota)
11	Meningkatnya penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan bagi masyarakat	Tersedianya informasi lingkungan hidup Jawa Tengah	3 Jenis yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 120 buku SLHD</li> <li>- 200 eksemplar buletin warta lingkungan</li> <li>- 100 eksemplar jurnal lingkungan</li> </ul>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Meningkatnya kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah sekolah di 35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah yang mendapat penghargaan ADIWIYATA	95 sekolah

Tabel 2.2 Program Pendukung Sasaran Strategis

No	Program Pendukung Sasaran Strategis	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	10.828.250.000,-	Sumber Anggaran 100 % APBD
2	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	6.074.420.000,-	Sumber Anggaran 100 % APBD
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.026.489.000,-	Sumber Anggaran 100 % APBD
4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	882.250.000,-	Sumber Anggaran 100 % APBD
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	434.695.000,-	Sumber Anggaran 100 % APBD
6	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.858.730.000,-	Sumber Anggaran 100 % APBD
7	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	625.000.000,-	Sumber Anggaran 100 % APBD

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BLH Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2015 ini, ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut

- 90 - 100 = Amat Baik
- 80 - 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut untuk 3 (tiga) aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

#### **A. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)**

Hingga akhir tahun 2015, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

a. **Tujuan-1** : Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Terinformasinya status mutu air sungai yang menjadi sungai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase status mutu air yang diinformasikan	100 % (8 sungai)	100 % (8 sungai)	100	100
Tertanganinya kasus lingkungan akibat dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup	Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100	100
Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Menengah Besar	Jumlah UMKM dan/ atau obyek domestik dan usaha/ atau kegiatan menengah/ besar yang diawasi dan ditangani pengelolaan limbahnya	15 UMKM, 170 usaha dan/ atau kegiatan	18 UMKM, 243 usaha dan/ atau kegiatan	120	135
Meningkatnya kebersihan dan keteduhan di daerah perkotaan di Jawa Tengah	Jumlah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang memperoleh ADIPURA	14 Kabupaten/ Kota	17 Kabupaten/ Kota	121	100
Meningkatnya kualitas dokumen AMDAL/ UKL-UPL	Jumlah rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah dilaksanakan	10 usaha/ kegiatan	40 usaha/ kegiatan	400	120

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada pelaku usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	75 pelaku usaha/ kegiatan	120 pelaku usaha/ kegiatan	160	100
Terinformasinya status mutu udara ambient 35 Kab/ Kota di Jawa Tengah	Persentase status mutu udara ambien Kabupaten/ Kota yang diinformasikan	100 % (35 Kabupaten/ Kota)	100 % (35 Kabupaten/ Kota)	100	100

**b. Tujuan-2:** Meningkatkan upaya pengendalian kerusakan lingkungan dan pelestarian ekosistem melalui konservasi

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran kedua sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah pesisir	1) Jumlah tanaman/ luasan penghijauan pantai	1). 510.000 batang	570.664 batang	112	128
	2) Bangunan pencegah abrasi/erosi/sabuk pantai	2) 535 meter	-----	-----	101,2
Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar kawasan hutan	1. Jumlah tanaman konservasi	1. 113.000 batang	105.936 batang	94	101,3
	2. Jenis tanaman lokal unggulan/ langka	2. 40 jenis tanaman langka	50 jenis tanaman langka	125	400
	3. Jumlah bangunan sipil teknis	3. 40 bangunan sipil teknis	10 unit bangunan sipil teknis	25	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan	40 Ha	77,01 Ha	193	165

**c. Tujuan-3 :** Meningkatkan penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan bagi masyarakat

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, terdapat 1 (satu) sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Meningkatnya penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan bagi masyarakat.	Tersedianya informasi lingkungan hidup Jawa Tengah	- 120 SLHD - 200 eksemplar buletin warta lingkungan - 100 eksemplar jurnal lingkungan	Tercetaknya Dokumen Statistik Lingkungan, Status Lingkungan Hidup Daerah dan informasi lingkungan melalui media cetak dan elektronik	100	100

**d. Tujuan-4 :** Meningkatkan Kemitraan Bersama Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya, Ketrampilan dan Kemandirian

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, terdapat 1 (satu) sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Meningkatnya kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah sekolah di 35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah yang mendapat penghargaan ADIWiyata	95 sekolah	149	156,84	176,79

## B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2015 dikategorikan **Amat Baik**. Jika dibandingkan dengan dengan tahun 2014 pengukuran pencapaian sasaran (PPS) dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan juga dikategorikan **Amat Baik**.

Selain hal itu sebagai bahan evaluasi terdapat pula target (sesuai Jenis sasaran dan target indikator yang ingin dicapai) dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

### a. Sasaran-1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Menengah Besar	Jumlah UMKM dan/ atau obyek domestik dan usaha/ atau kegiatan menengah/ besar yang diawasi dan ditangani pengelolaan limbahnya	15 UMKM, 170 usaha dan/ atau kegiatan	18 UMKM, 243 usaha dan/ atau kegiatan	120	350
Meningkatnya kualitas dokumen AMDAL/ UKL-UPL	Jumlah rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah dilaksanakan	10 usaha/ kegiatan	40 usaha/ kegiatan	400	120
Tertanganinya kasus lingkungan akibat dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup	Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran / perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100	100
Meningkatnya kebersihan dan keteduhan di daerah perkotaan di Jawa Tengah	Jumlah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang memperoleh ADIPURA	14 Kabupaten/ Kota	17 Kabupaten/ Kota	121	100
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran -1</b>				185,25	167,5

Berdasarkan hasil pengukuran **sasaran -1**, indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti capaian **sasaran -1** melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran -1**, diantaranya adalah :

- Keberadaan industri kecil yang berpotensi menimbulkan pencemaran cukup banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dapat difasilitasi pembangunan IPAL Komunal.
- Kurang pedulinya para pelaku usaha/ kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan sehingga masih banyak yang membuang limbah cair, udara dan limbah padat maupun limbah B3 langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengolahan dengan baik terlebih dahulu.

Upaya yang perlu dilakukan :

- Fasilitasi pembangunan IPAL Komunal dengan perencanaan yang matang dan melibatkan partisipasi masyarakat serta pemilihan lokasi secara tepat.
- Pembinaan secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha/ kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah agar mampu melakukan pengelolaan lingkungan secara mandiri.

**b. Sasaran-2:**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah pesisir	1) Jumlah tanaman/ luasan penghijauan pantai	1)510.000 batang	570.664 batang	112	101,2
	2) Bangunan pencegah abrasi/erosi/sabuk pantai	2) 535 meter	---	---	128
Terinformasinya status mutu udara ambient 35 Kab/ Kota di Jawa Tengah	Persentase status mutu udara ambien Kabupaten/ Kota yang diinformasikan	100 % (35 Kabupaten/ Kota)	100 % (35 Kabupaten/ Kota)	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran -2</b>				<b>106</b>	<b>100,6</b>

Berdasarkan hasil pengukuran **sasaran -2**, indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut sesuai target. Hal ini berarti terhadap capaian **sasaran -2** sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran -2** , di antaranya adalah :

- Adanya regulasi baru yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa aturan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat harus berbadan hukum dan adanya **perubahan kewenangan** bahwa bangunan pencegah abrasi/ akresi (sabuk pantai) bukan lagi **kewenangan** Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan
- Lokasi pemantauan udara ambien merupakan daerah yang secara dampak pencemaran udaranya sangat tinggi seperti daerah permukiman, industri dan padat lalu lintas. , sehingga belum mencerminkan kondisi kualitas udara secara umum
- Kondisi lingkungan pesisir yang cepat mengaami perubahan akibat abrasi dan akresi yang sangat tinggi

Upaya yang perlu dilakukan:

- Perlunya perencanaan yang matang dimulai dari verifikasi usulan kelompok masyarakat yang mengharuskan berbadan hukum sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan
- Perlu perluasan lokasi pemantauan udara ambien agar dapat didapatkan kondisi kualitas udara ambien yang mewakili secara umum
- Memperbaiki kualitas lingkungan pesisir dengan melibatkan swasta, akademisi dan masyarakat

### c. Sasaran-3:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar kawasan hutan	1) Jumlah tanaman konservasi	1) 113.000 batang	105.936 batang	94	101,3
	2) Jenis tanaman lokal unggulan / langka	2) 40 jenis tanaman langka	50 jenis tanaman langka	125	400
	3) Jumlah bangunan sipil teknis	3) 40 bangunan sipil teknis	10 unit	25	100
Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada pelaku usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	75 pelaku usaha/ kegiatan	120 pelaku usaha/ kegiatan	160	100
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran -3</b>				101	175,33

Berdasarkan hasil pengukuran **sasaran -3**, indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti capaian terhadap **sasaran -3** melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran -3**, diantaranya adalah :

- Adanya regulasi baru dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu terkait aturan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat yang harus berbadan hukum, sehingga tidak semua bantuan hibah berupa bangunan sipil teknis dapat dilaksanakan
- Belum tersedianya sistem penyusunan data base lingkungan yang memadai.

Upaya yang perlu dilakukan:

- Perlunya perencanaan yang matang dimulai dari verifikasi usulan kelompok masyarakat yang mengharuskan berbadan hukum sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan
- Perbaikan Sistem Informasi Lingkungan dengan melibatkan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah

#### d. Sasaran-4:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-4, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan	40 Ha	77,01 Ha	193	165
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran -4</b>				193	165

Berdasarkan hasil pengukuran **sasaran -4**, indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti capaian **sasaran -4** melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran 4**, diantaranya adalah :

- Berkurangnya daerah resapan dan terbatasnya ruang terbuka hijau di perkotaan untuk konservasi air dan pengendalian pencemaran udara.

Upaya yang perlu dilakukan :

- Meningkatkan kualitas maupun kuantitas daerah resapan dan ruang terbuka hijau di perkotaan

e. **Sasaran-5 :**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-5, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2014	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Meningkatnya penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan bagi masyarakat.	Tersedianya informasi lingkungan hidup Jawa Tengah	- 120 SLHD - 200 eksemplar buletin warta lingkungan - 100 eksemplar jurnal lingkungan	Tercetaknya Dokumen Statistik Lingkungan, Status Lingkungan Hidup Daerah dan informasi lingkungan melalui media cetak dan elektronik	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran -5</b>				100	100

Berdasarkan hasil pengukuran **sasaran -5**, indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Tidak terdapat kendala/ hambatan dalam pencapaian kinerja.

f. **Sasaran-6 :**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-6, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2014	% Realisasi Target	% Tahun Sebelumnya
Meningkatnya kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah sekolah di 35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah yang mendapat penghargaan ADIWIYATA	95 sekolah	149 sekolah	156,84	176,79
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran -6</b>				156,84	176,79

Berdasarkan hasil pengukuran **sasaran -6**, indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dipenuhi dan bahkan melebihi target. Jumlah sekolah yang meraih penghargaan ADIWIYATA merupakan salah satu indikator **outcome** yang grafiknya setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan kesadaran sekolah di Jawa Tengah semakin meningkat untuk menjadi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan sehingga dapat meraih penghargaan tersebut. Tidak terdapat kendala/ hambatan dalam pencapaian kinerja.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Sumber dana yang digunakan pada tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015. Realisasi belanja dan pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

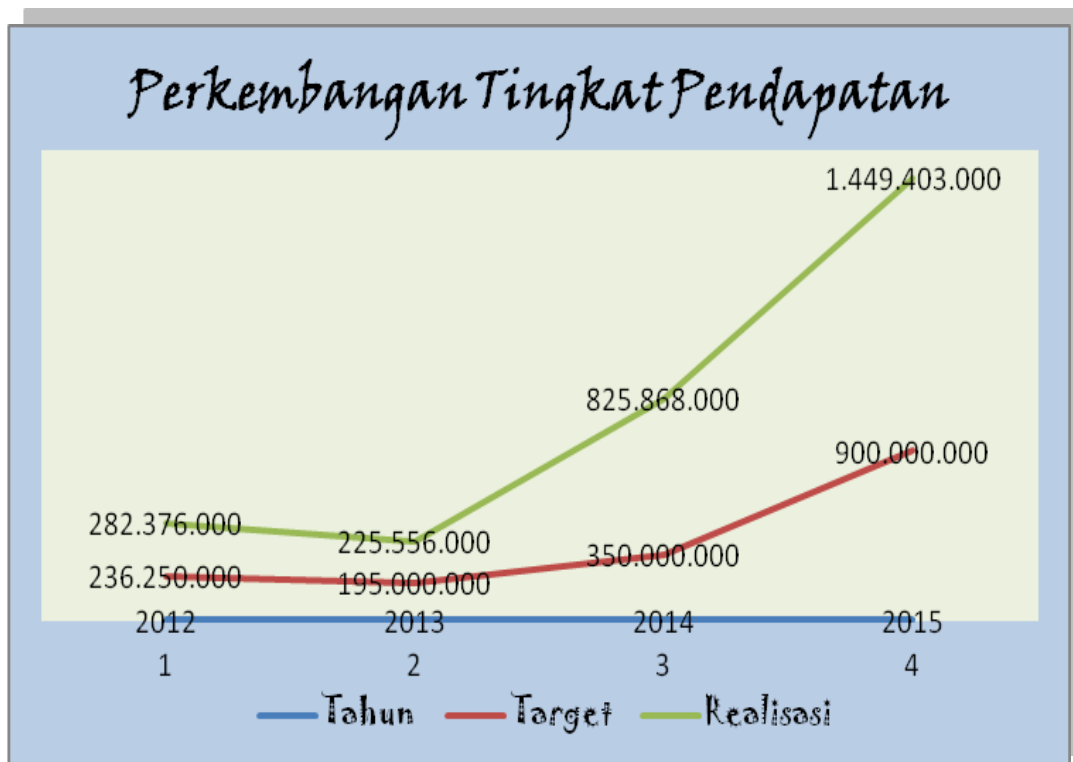
#### a. Target Pendapatan

Tahun 2015 Balai Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah memperoleh pendapatan sebesar Rp. 1.449.403.000,- . BPL2H Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 ditargetkan pendapatannya, yakni sebesar Rp. 900.000.000,- sehingga realisasi pendapatannya sebesar 161 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target dan bahkan melampaui dari target yang ditetapkan antara lain: adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung laboratorium dan adanya penambahan personil (SDM) laboratorium serta meningkatnya permintaan pemantauan/ uji laboratorium lingkungan bagi perusahaan/ industri khususnya di Jawa Tengah.

Target pendapatan awal pada tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 900.000.000,-. Penetapan target pendapatan ini disesuaikan dengan sarana pendukung operasional laboratorium yang dimiliki BPL2H Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah baik itu SDM maupun peralatan uji laboratorium yang memadai.

**Grafik 3.1**  
**Perkembangan Pendapatan BPL2H Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2012-2015)**



Sumber: BPL2H Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, 2015

#### **b. Pelaksanaan APBD Tahun 2015**

Pada tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 45.289.062.000,-, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.951.882.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 31.337.180.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 26.900.766.838,- dari belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 31.337.180.000,- atau sebesar 85,84%, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 90,89%. Realisasi fisik tidak dapat mencapai 100% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait aturan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu terkait aturan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat yang harus berbadan hukum dan perubahan kewenangan khususnya pada pembangunan konstruksi bangunan pencegah abrasi/akresi atau sabuk pantai yang bukan lagi kewenangan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Sisa anggaran pada pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2015 sebesar Rp. 4.436.413.162,- dari belanja langsung sebesar Rp. 31.337.180.000,- atau sebesar 14,16 % yang merupakan sisa dan hasil negosiasi kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2014 penyerapan/ realisasi keuangan sebesar 91,95%, sedangkan sisa anggaran sebesar 8,05%.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **sangat baik**, hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai rata-rata (100%) untuk semua kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan target dan melalui perencanaan yang matang;
- b. Semua kegiatan yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang SPM bidang Lingkungan Hidup dicapai rata-rata (100 %). Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan SPM bidang Lingkungan Hidup dapat terselesaikan dan **outcome** atau **hasil** dari semua kegiatan tersebut secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas;
- c. Semua kegiatan yang mendukung capaian target RPJMD 2013-2018 dicapai rata-rata 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 bahkan melampaui target misalnya kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mencapai 193%, penanaman mangrove/ penghijauan pantai mencapai 145 %, sehingga hal tersebut dapat dijadikan motivasi untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang;
- d. Secara umum indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah berorientasi **outcome** atau **hasil**. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak secara langsung menunjukkan outcome pada tahun berjalan, sebagai contoh yaitu penanaman bibit tanaman konservasi khususnya jenis buah-buahan yang perlu waktu sekitar 2-3 tahun baru dapat menghasilkan buah sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu perlu ada kesepahaman bersama terkait hal tersebut.

#### B. Permasalahan Atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala terkait pencapaian kinerja, diantaranya :

- 1) Peningkatan jumlah penduduk dan beragamnya aktifitas kegiatan masyarakat telah memicu meningkatnya buangan limbah padat, cair, gas atau radiasi dan kebisingan yang berpotensi mencemari/merusak lingkungan hidup.
- 2) Keterbatasan SDM yang mengelola laboratorium di instansi Lingkungan Hidup baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- 3) Terjadi kerusakan lingkungan pesisir dan laut serta kerusakan hutan *mangrove* akibat abrasi dan akresi.
- 4) Berkurangnya daerah resapan dan terbatasnya RTH di perkotaan untuk konservasi air dan pengendalian pencemaran udara.

- 5) Masih ada kabupaten/kota yang belum memiliki Lisensi Komisi Penilai AMDAL sehingga penilai dokumen AMDAL dilaksanakan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi. Hingga saat ini baru terdapat sekitar 10 Kabupaten/ Kota yang memiliki lisensi Komisi Penilai AMDAL, jadi baru sekitar 30% dari total 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.
- 6) Masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang membuang limbah cair, udara dan limbah padat maupun limbah B3 langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- 7) Adanya perubahan regulasi terkait aturan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat yang mewajibkan berbadan hukum.

### C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang perlu diterapkan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Menambah jumlah SDM pengelola laboratorium dan meningkatkan pengetahuan SDM pengelola laboratorium di instansi Lingkungan Hidup baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- 3) Kualitas lingkungan pesisir dapat diperbaiki dengan cara melibatkan unsur swasta, akademisi dan masyarakat;
- 4) Kualitas dan RTH di perkotaan maupun daerah resapan perlu ditingkatkan;
- 5) Mendorong kabupaten/ kota mengusulkan untuk mendapatkan Lisensi Komisi Penilai AMDAL sehingga dapat melakukan penilaian secara mandiri dan tidak menumpuk pada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat;
- 6) Peningkatan kesadaran dalam melakukan pengelolaan lingkungan kepada pelaku usaha/ kegiatan berpotensi menghasilkan limbah atau berpotensi menimbulkan pencemaran/ kerusakan lingkungan;
- 7) Perlu verifikasi usulan kelompok masyarakat terkait status badan hukum untuk bantuan hibah sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan sesuai aturan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, Februari 2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI JAWA TENGAH

**Ir. AGUS SRIYANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590815 198703 1 009